



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Senin

Tanggal: 06 April 2020

Halaman: 2

FOKUS COVID-19 HINGGA PEMULIHAN SOSIAL DAN EKONOMI

Restrukturisasi APBD Kebutuhan Mendesak

YOGYA (KR) - Selain pergeseran kegiatan untuk fokus pada penanggulangan penyebaran Covid-19, restrukturisasi APBD 2020 juga menjadi kebutuhan mendesak. Hal ini agar pemulihan kondisi sosial dan ekonomi usai wabah korona selesai, bisa tertangani dengan cepat.

Menurut Wakil Walikota Yogya Heroe Poerwadi, dalam melakukan perubahan struktur APBD pihaknya akan berkoordinasi dengan dewan. "Kita harus prediksi kapan ini akan selesai. Selanjutnya menyiapkan skema pemulihan kondisi sosial ekonomi dan membangkitkan kembali potensi ekonomi," jelasnya, Minggu (5/4).

Selama masa tanggap darurat penanganan Covid-19, hampir semua transaksi ekonomi mengalami penurunan. Di samping itu relasi sosial di masyarakat juga ikut berkurang sehingga perlu ada pemulihan. Kendati demikian, pada masa darurat kali ini penanganan virus Korona tetap menjadi prioritas, tanpa mengenyampingkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Salah satu upaya dalam melakukan

restrukturisasi APBD ialah memetakan beberapa program dan kegiatan yang masih bisa dipindahkan. Program fisik yang tidak menyangkut pemulihan sosial ekonomi maupun pembangkitan ekonomi akan ditunda. Begitu juga kegiatan perjalanan dinas selama dua bulan ini yang batal digelar pun otomatis dialihkan untuk penanganan Covid-19. "Jadi yang kita petakan hampir menyeluruh pada struktur anggaran. Yang jelas struktur belanja dan pendapatan pasti akan jauh berbeda," imbuhnya.

Heroe mencontohkan, pada APBD 2020 struktur anggaran hampir menyentuh Rp 2 triliun. Dengan adanya penundaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat yang sempat dialokasikan Rp 161 miliar,

otomatis membuat struktur berubah. Begitu juga pendapatan dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah yang pasti terdampak.

Berdasarkan perkiraan awal, penurunan pendapatan asli daerah (PAD) pada tahun ini bisa mencapai 30 hingga 60 persen dari target. Jika tidak dilakukan antisipasi melalui restrukturisasi APBD maka berpotensi membengkaknya defisit anggaran hingga beban keuangan semakin berat. "Ini kita jaga betul. Harapan kita penyebaran virus Korona bisa teratasi, dan aktivitas sosial ekonomi setelahnya juga bisa segera bangkit," tandasnya.

Sekretaris Komisi B DPRD Kota Yogya Rifki Listianto, sebelumnya mengungkapkan potensi penurunan PAD akibat Covid-19 turut menjadi perhatian dewan. Hanya, terkait perkiraan penurunan pendapatan tersebut harus dihitung secara matang. Pasalnya, tidak hanya sektor pajak hotel dan restoran yang terdampak secara langsung melainkan delapan pajak daerah lainnya. (Dhi)-a

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 31 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005